

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

Laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, dana cadangan, aset, kewajiban, ekuitas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

Pelaporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- (a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- (b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

- (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (e) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005.
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140)
- (h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25)
- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- (j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- (k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (m) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (n) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (o) Peraturan Bupati Badung Nomor 32 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (p) Peraturan Bupati Badung Nomor 33 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah .

- (q) Peraturan Bupati Badung Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 32 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (r) Peraturan Bupati Badung Nomor 15 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 33 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- Bab I      Pendahuluan
  - 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PD
  - 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PD
  - 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PD
- Bab II     Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD Perangkat Daerah
  - 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
  - 2.2. Kebijakan Keuangan
  - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III    Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
  - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PD
  - 3.2. Penjelasan Ikhtisar Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
  - 3.3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
  - 3.4. Penjelasan Terhadap Realisasi Belanja yang Kurang dari 75 %
- Bab IV    Kebijakan akuntansi
  - 4.1. Entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah PD
  - 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah
  - 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada PD

4.5. Kebijakan akuntansi tertentu

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan PD

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Laporan Operasional

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

5.4. Neraca

Bab VI Penjelasan Atas Informasi - Informasi Non Keuangan

Bab VII Simpulan Penting Tentang Laporan Keuangan

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN**  
**DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PERANGKAT DAERAH**

**2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional**

Sesuai dengan kebijakan pembangunan yaitu untuk menciptakan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik, maka sasaran makro ekonomi daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 sebagai berikut :

**2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan prediksi Tahun 2021 serta dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sektor ekonomi yang dimiliki, masalah keamanan, perkembangan ekonomi nasional serta asumsi-asumsi lainnya maka pertumbuhan ekonomi daerah Badung Tahun 2021 diproyeksikan sebesar 6,15 – 7,15 %.

**2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,15 – 7,15 %, maka target PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga berlaku ditargetkan 74.460 miliar rupiah sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 43,370 miliar rupiah. Target tersebut akan dapat diwujudkan apabila produksi daerah mampu ditingkatkan dan harga – harga tidak mengalami penurunan.

**2.1.3 Pendapatan Perkapita**

Dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,15 – 7,15 % maka PDRB perkapita Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp 68,75 juta rupiah per tahun.

**2.1.4 Inflasi**

Untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah maka laju inflasi agar dapat dikendalikan pada kisaran 3,00 – 5,00 % khususnya terhadap harga barang – barang kebutuhan pokok.

**2.2. Kebijakan Keuangan**

Dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021 ada beberapa arah dan kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- a. Mengintensifkan Pendapatan Daerah dari sumber yang telah ada dan menggali potensi yang masih memungkinkan untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Menerapkan sistem informasi yang valid dan handal dalam menentukan potensi pajak atau wajib pajak.
- c. Mengoptimalkan dana perimbangan untuk pendanaan pembangunan daerah.
- d. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat.

- e. Memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak sesuai standar yang ada serta pelatihan teknologi komputerisasi/sistem informasi manajemen pajak daerah.
- f. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah.
- g. Serta memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik yang telah mematuhi ketentuan peraturan.

### **2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung selalu memperhatikan keseimbangan pembangunan yang ada di Badung Selatan, Badung Tengah dan Badung Utara, sebagai satu kesatuan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik dan pemerintahan sehingga terwujud pembangunan yang terencana dan berkelanjutan khususnya dalam sub sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana

Berdasarkan kondisi dan permasalahan pembangunan Kabupaten Badung serta untuk mewujudkan adanya peningkatan pembangunan dikaitkan dengan visi dan misi Kabupaten Badung yang dijadikan landasan Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, maka dirumuskan sasaran dan arah kebijakan.

Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung adalah :

#### **A. Tujuan :**

- Terwujudnya Pelayanan yang prima

#### **B. Sasaran :**

1. Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT.
2. Meningkatnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
3. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Desa.
4. Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa.
5. Meningkatnya usaha ekonomi desa.
6. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

BAB III  
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

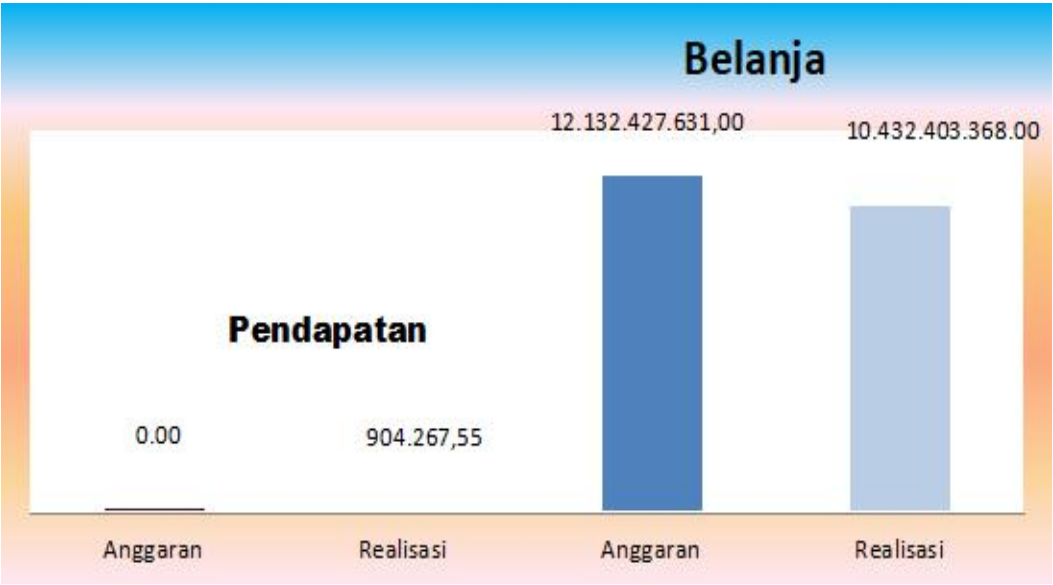
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi anggaran setelah perubahan 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1. Realisasi Pendapatan dan Belanja LRA per 31 Desember 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1.	PENDAPATAN	0.00	904,267.55	0.00	4,582,991.84
2.	BELANJA	12,132,427,631.00	10,359,309,388.00	85.39	10.795.332.957
3	SURPLUS/(DEFISIT)	(12,132,427,631.00)	(10,358,405,120.45)	85.38	(36,026,553,947.12)
4	PEMBIAYAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	(36,026,553,947.12)
5	SILPA	(12,132,427,631.00)	(10,358,405,120.45)	85.38	(36,026,553,947.12)

Gambaran Realisasi Pendapatan dan Belanja LRA per 31 Desember 2021 adalah sebagai Berikut :



Capaian pendapatan tahun 2021 dengan target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar Rp. 904.267,55 sedangkan realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 4.582.991,84. Terjadi penurunan realisasi pendapatan tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp.

Komponen pendapatan terdiri dari :

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	0,00	904.267,55	0,00	4.582.991,84
Jumlah		0,00	904.267,55	0,00	4.582.991,84

Komponen pendapatan asli daerah terdiri dari :

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

Komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari :

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Jasa Giro Pemegang Kas - LRA	0,00	904.267,55	0,00	4.582.991,84
3	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	904.267,55	0,00	4.582.991,84

Pada anggaran setelah perubahan 2021 dialokasikan anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 12.132.427.631,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.432.403.368,00 atau 85,99%.

Capaian belanja sebesar 85,99 % terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut

Tabel 3.2. Realisasi Belanja Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)	21 %.
			Rp	%		
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.520.464.225,00	6.591.652.688,00	87,65	7.477.935.281,00	10
2	BELANJA LANGSUNG	4.611.963.406,00	3.840.750.680,00	83,28	3.317.397.676,00	
	JUMLAH	12.132.427.631,00	10.432.403.368,00	85,99	10.795.332.957,00	8

Catatan



Komponen belanja tidak langsung terdiri dari :

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	7.520.464.225,00	6.591.652.688,00	87,65	7.477.935.281,00
Jumlah		7.520.464.225,00	6.591.652.688,00	87,65	7.477.935.281,00

Komponen belanja pegawai terdiri dari :

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	3,694,814,401.00	3,231,279,249.00	87.45	3,475,328,390.00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3,825,649,824.00	3,360,373,439.00	87.84	4,002,606,891.00
Jumlah		7,520,464,225.00	6,591,652,688.00	87.65	7,477,935,281.00

Komponen belanja tambahan penghasilan PNS terdiri dari :

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3,825,649,824.00	3,360,373,439.00	87.84	3,920,664,891.00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif	0.00	0.00	-	81,942,000.00
Jumlah		3,825,649,824.00	3,360,373,439.00	87.84	4,002,606,891.00

Belanja Langsung dengan target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar Rp. 12.132.427.631,00 terealisasi sebesar Rp. 10.432.403.368,00 atau 85,99 %. Nilai realisasi Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.115.005.692,00 dibandingkan dengan Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 3.317.397.676,00 .

Komponen belanja langsung terdiri dari :

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	7,520,464,225.00	6,591,652,688.00	87.65	1,350,729,000.00
2	Belanja Barang dan Jasa	4,455,481,414.00	3,773,997,180.00	84.70	1,966,668,676.00
3	Belanja Modal	156,481,992.00	66,753,500.00	42.66	0.00
Jumlah		12,132,427,631.00	10,432,403,368.00	85.99	3,317,397,676.00

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	7,520,464,225.00	6,591,652,688.00	87.65	1,350,729,000.00
Jumlah		7,520,464,225.00	6,591,652,688.00	87.65	1,350,729,000.00

Komponen belanja barang dan jasa terdiri dari :

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Barang dan Jasa	4,455,481,414.00	3,773,997,180.00	84.70	1,966,668,676.00
Jumlah		4,455,481,414.00	3,773,997,180.00	84.70	1,966,668,676.00

Komponen belanja modal terdiri dari

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112,866,992.00	23,798,500.00	21.09	0.00
2	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	43,615,000.00	42,955,000.00	98.49	0.00
Jumlah		156,481,992.00	66,753,500.00	42.66	0.00

Tabel 3.3. Realisasi Belanja Per Program Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,520,464,225.00	6,591,652,688.00	87.65	7,477,935,281.00
II	BELANJA LANGSUNG	4,611,963,406.00	3,840,750,680.00	83.28	3,317,397,676.00
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	0.00	0.00	0.00	408,804,013.00
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	0.00	0.00	0.00	97,676,000.00
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	0.00	0.00	0.00	123,890,500.00
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	0.00	0.00	0.00	6,326,800.00
5	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	0.00	0.00	0.00	97,272,450.00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN	0.00	0.00	0.00	23,362,800.00
7	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN	0.00	0.00	0.00	856,724,775.00
8	PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	0.00	0.00	0.00	1,531,862,738.00
9	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	0.00	0.00	0.00	171,477,600.00
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	671,049,535.00	484,936,732.00	72.27	0.00
	- PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	12,232,301.00	5,792,300.00	47.35	0.00
	- ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	93,782,738.00	57,583,100.00	61.40	0.00
	- PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	156,740,496.00	66,753,500.00	42.59	0.00
	- PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100,860,212.00	85,312,376.00	84.58	0.00
	- PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	307,433,788.00	269,495,456.00	87.66	0.00
11	PROGRAM PENATAAN DESA	4,446,555.00	1,599,900.00	35.98	0.00
	- PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	4,446,555.00	1,599,900.00	35.98	0.00
12	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3,075,822,486.00	2,572,024,052.00	83.62	0.00
	- PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3,075,822,486.00	2,572,024,052.00	83.62	0.00
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	860,644,830.00	782,189,996.00	90.88	0.00
	- PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDNG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	860,644,830.00	782,189,996.00	90.88	0.00
JUMLAH		12,132,427,631.00	10,432,403,368.00	85.99	10,795,332,957.00

3.2 PENJELASAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA (LAKIP) PER KEGIATAN

Indikator kinerja dari program-program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung akan diuraikan dalam setiap kegiatan sebagai berikut :

1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	1.	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
		Masukan	: Rp. 12.232.301,00
		Hasil	: Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja dengan target kinerja 100% terealisasi sebesar Rp. 5.792.300,00 atau 47,35%.
	2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
		Masukan	: Rp. 7.520.464.225,00
		Hasil	: Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah dengan target kinerja 100% terealisasi sebesar Rp. atau %.
	3.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
		Masukan	: Rp. 93.782.738,00
		Hasil	: Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah dengan target kinerja 100% terealisasi sebesar Rp. 57.583.100,00 atau 61,40%.
	4.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
		Masukan	: Rp. 156.740.496,00
		Hasil	: Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan target kinerja 100% terealisasi sebesar Rp. 66.753.500,00 atau 42,59%.
	5.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Masukan	: Rp. 100.860.212,00
		Hasil	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan target kinerja 100% terealisasi sebesar Rp. 85.116.180,00 atau 84,39%.
	6.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
		Masukan	: Rp. 307.433.788,00

		Hasil	:	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan target kinerja 100% terealisasi sebesar Rp. 269.495.456,00 atau 87,66%.
<b>2.</b>	<b>Program Penataan Desa</b>			
	<b>1.</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>		
		Masukan	:	Rp. 4.446.555,00
		Keluaran	:	Jumlah banjar dinas/lingkungan yang dimekarkan
		Hasil	:	Terselenggaranya penataan desa dengan target kinerja 100% terealisasi sebesar Rp. 1.599.900,00 atau 35,98 %.
<b>3.</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>			
	<b>1.</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		
		Masukan	:	Rp. 3.075.822.486,00
		Keluaran	:	
		Hasil	:	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa dengan target kinerja 100% terealisasi sebesar Rp. 2.572.024.052,00 atau 83,62 %.
<b>4.</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>			
	<b>1.</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		
		Masukan	:	Rp. 860.644.830,00
		Keluaran	:	
		Hasil	:	Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan monitoring swadaya murni masyarakat desa dengan target kinerja 100% terealisasi sebesar Rp. 782.386.192,00 atau 90,91%.

**3.3. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN DAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI.**

Secara garis besarnya, kondisi/gambaran permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

Beberapa realisasi belanja tidak dapat mencapai target lebih dari 75 % hal ini dikarenakan :

1. adanya efesiensi harga
2. direalisasikan sesuai kebutuhan
3. adanya rasionalisasi
4. karena ada pandemi covid 19 sehingga kegiatan tidak dilaksanakan

Untuk pencairan dananya disesuaikan dengan keadaan yang terjadi, sebagai contoh :

- a. Pada belanja bahan bakar minyak/gas
- b. Belanja Makanan dan Minuman

**3.4. PENJELASAN TERHADAP REALISASI BELANJA YANG KURANG DARI 75 %**

- 1. 01. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
  - 01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
    - 01.1.01.24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor
      - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor dengan anggaran *Rp. 1.477.092,00* terealisasi *Rp. 0 ,00 (0%)* karena tidak tersedianya anggaran di SPD
    - 01.1.01.26. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dengan anggaran *Rp. 6.286.477,00* terealisasi *Rp. 3.000.000,00 (47,72%)* karena hanya tersedianya anggaran sesuai kemampuan APBD
  - 01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
    - 07.1.01.24. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor dengan anggaran *Rp. 1.477.092,00* terealisasi *Rp. 292.500,00 (19,80%)* karena hanya tersedianya anggaran sesuai kemampuan APBD
- 2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - 06.01. Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
    - 06.01.20.01 - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Kantor dengan anggaran *Rp. 3.500.000,00* terealisasi *Rp. 1.000.000,00 (28,57%)* karena hanya tersedianya anggaran sesuai kemampuan APBD
  - 06.04. Penyedia Bahan Logistik Kantor**
    - 06.04.01.36. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kegiatan Kantor Lainnya dengan anggaran *Rp. 42.140.000,00* terealisasi *Rp. 30.244.000,00 (71,77%)* karena rekonsiliasi pengamprahannya sesuai SIPD
    - 06.04.01.52. - Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan anggaran *Rp. 4.500.000,00* terealisasi *Rp. 480.000,00 (10,67%)* karena diamprah sesuai dengan kebutuhan
  - 06.05. Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan**

- 06.05.01.26. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dengan anggaran *Rp. 23.782.738,00* terealisasi *Rp. 5.999.100,00 (25,22%)* karena pengamprahannya disesuaikan dengan anggaran yang disiapkan di SIPD
- 3. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 07.06. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
- 07.06.01.24. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor dengan anggaran *Rp. 258.504,00* terealisasi *Rp. 0,00 (0%)* karena tidak tersedianya anggaran di SPD
- 4. 08. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 08.01. Penyedia Jasa Surat Menyurat**
- 08.01.01.24. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor dengan anggaran *Rp. 17.448.282,00* terealisasi *Rp. 7.948.500,00 (45,55%)* karena hanya tersedianya anggaran sesuai kemampuan APBD
- 08.01.01.27. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos dengan anggaran *Rp. 2.724.000,00* terealisasi *Rp. 1.000.000,00 (36,71%)* karena hanya tersedianya anggaran sesuai kemampuan APBD
- 08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
- 08.01.04.59. - Belanja Tagihan Telepon dengan anggaran *Rp. 6.056.400,00* terealisasi *Rp. 4.023.608,00 (66,44%)* karena hanya tersedianya anggaran sesuai kemampuan APBD
- 5. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 09.02. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**
- 09.02.01.27. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos dengan anggaran *Rp. 120.000,00* terealisasi *Rp. 0,00 (0%)* karena tidak tersedianya anggaran di SPD
- 09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
- 09.06.19.32. - Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio dengan anggaran *Rp. 300.000,00* terealisasi *Rp. 0,00 (0%)* karena tidak tersedianya anggaran di SPD
- 09.06.19.05. - Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Ubit- Personal Computer dengan anggaran *Rp. 22.330.000,00* terealisasi



*Rp. 3.215.000,00 (14,40%)* karena hanya tersedianya anggaran sesuai kemampuan APBD

- 09.06.20.01. - Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Kantor dengan anggaran *Rp. 2.098.284,00* terealisasi *Rp. 400.000,00 (19,06%)* karena hanya tersedianya anggaran sesuai kemampuan APBD

**6. 15. Penyelenggaraan Penataan Desa**

**15.02. Fasilitas Tata Wilayah Desa**

- 15.02.01.04. - Belanja bahan-bahan bakar dan Pelumas dengan anggaran *Rp. 1.668.600,00* terealisasi *Rp. 0,00 (0%)* karena pengamprahannya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di SIPD
- 15.02.01.26. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dengan anggaran *Rp. 1.123.564,00* terealisasi *Rp. 323.000,00 (28,75%)* karena pengamprahannya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di SIPD
- 15.02.01.27. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos dengan anggaran *Rp. 90.000,00* terealisasi *Rp. 30.000,00 (33,33%)* karena pengamprahannya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di SIPD

**7. 17. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**

**17.01. Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**

- 17.01.01.24. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor dengan anggaran *Rp. 1.942.134,00* terealisasi *Rp. 687.500,00 (35,40%)* karena sesuai dana yang di acc oleh BPKAD dan efisiensi dari rekanan
- 17.01.01.26. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dengan anggaran *Rp. 579.125,00* terealisasi *Rp. 180.500,00 (31,17%)* karena sesuai dana yang di acc oleh BPKAD dan efisiensi dari rekanan
- 17.01.01.27. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos dengan anggaran *Rp. 270.000,00* terealisasi *Rp. 0,00 (0%)* karena sesuai arahan dari BPKAD agar diambil dari umum

**17.04. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

- 17.04.01.04. - Belanja bahan-bahan bakar dan Pelumas dengan anggaran *Rp. 4.264.200,00* terealisasi *Rp. 0,00 (0%)* karena kegiatan turun ke desa ditiadakan karena menggunakan sistem online

- 17.04.01.24. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor dengan anggaran *Rp. 1.214.507,00* terealisasi *Rp. 339.900,00* (27,99%) karena sesuai dana yang di acc oleh BPKAD dan efesiensi dari rekanan
- 17.04.01.26. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dengan anggaran *Rp. 2.509.390,00* terealisasi *Rp. 250.000,00* (9,96%) karena sesuai dana yang di acc oleh BPKAD dan efesiensi dari rekanan
- 17.04.01.27. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos dengan anggaran *Rp. 405.000,00* terealisasi *Rp. 0,00* (0%) karena sesuai arahan dari BPKAD agar diambil dari umum

**17.09. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa**

- 17.09.01.24. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor dengan anggaran *Rp. 1.022.587,00* terealisasi *Rp. 684.600,00* (66,95%) karena efesiensi dari harga rekanan
- 17.09.01.26. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dengan anggaran *Rp. 744.353.794,00* terealisasi *Rp. 387.582.982,00* (52,11%) karena info dari BPKAD untuk cetak lapran dan cetak foto dalam bentuk soft copy

**17.11. Fasilitas Penyusunan Profil Desa**

- 17.11.01.04. - Belanja bahan-bahan bakar dan Pelumas dengan anggaran *Rp. 3.429.900,00* terealisasi *Rp. 360.000,00* (10,50%) karena pengamprahannya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di SIPD
- 17.11.01.26. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dengan anggaran *Rp. 12.896.116,00* terealisasi *Rp. 1.992.000,00* (15,45%) karena pengamprahannya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di SIPD
- 17.11.01.27. - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos dengan anggaran *Rp. 270.000,00* terealisasi *Rp. 60.000,00* (0%) karena pengamprahannya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di SIPD

**8. 18.                   Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota**

**18.07.                   Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat**

- 18.07.01.26.   -   Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak dengan anggaran *Rp. 1.693.639,00* terealisasi *Rp. 968.000,00 (57,16%)* karena adanya keterbatasan ketersediannya dana Pemkab mengakibatkan realisasi dilakukan dengan selektif (menggunakan skala prioritas)

**18.09.                   FasilitasiTim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**

- 18.09.01.75.   -   Belanja Pakaian Batik Tradisional dengan anggaran *Rp. 65.175.000,00* terealisasi *Rp. 46.750.000,00 (71,73%)* karena sesuai dengan kontrak Belanja pakaian Batik Tradisional ini disebabkan karena adanya penawaran
- 18.09.26.01.   -   Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain dengan anggaran *Rp. 3.600.000,00* terealisasi *Rp. 2.400.000,00 (66,67%)* karena kegiatan sosialisasi anti narkoba yang seharusnya dijadwalkan 3x pertemuan menjadi 2x pertemuan karena masa pandemi covid 19

## **Bab IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Badung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- **Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas**  
Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- **Basis Akrua (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca**  
Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

##### **A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

###### **I. Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan

pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

## **II. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas belanja pegawai dan belanja barang. Belanja modal diklasifikasikan atas belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

## **B. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

### **I. Pendapatan**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

### **II. Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

## **C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **D. NERACA**

### **1. Aset**

#### **1.1. Aset Lancar**

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi.

**1.1.1. Kas**

Merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

**1.1.2. Investasi Jangka Pendek**

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan.

**1.1.3. Piutang**

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar.

**1.1.4. Piutang Lain - lain**

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

**1.1.5. Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

**1.2. Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

#### **1.2.1. Investasi Non Permanen**

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti pemberian pinjaman kepada perusahaan negara/daerah, pinjaman kepada pemerintah daerah, investasi dalam bentuk dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya.

#### **1.2.2. Investasi Permanen**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan yang mempunyai masa investasi lebih dari 12 (dua belas bulan). Investasi permanen antara lain :

1. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, lembaga keuangan Negara, BHMN, badan-badan internasional seperti IMF, ADB, serta badan hukum lainnya.
2. Investasi permanen lainnya, yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

#### **1.3. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva tang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

##### **1.3.1. Tanah**

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

### **1.3.2. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

### **1.3.3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

### **1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga



perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung ( Tenaga kerja, bahan baku ) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

**1.3.5. Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

**1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

**1.3.7. Akumulasi Penyusutan**

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line methode).

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktifitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktifitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

#### **1.4. Dana Cadangan**

##### **1.4.1. Dana Cadangan**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah yang sumbernya adalah dari hasil penyesihan sebagian kelebihan realisasi pendapatan untuk digunakan sebagai Cadangan Anggaran Pembangunan. Dana cadangan merupakan restricted cash pemerintah yang akan digunakan apabila terjadi defisit dalam tahun anggaran berikutnya.

#### **1.5. Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

##### **1.5.1. Tagihan Jangka Panjang**

##### **1.5.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kemitraan dengan pihak ketiga menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu aset yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. Kemitraan dengan pihak ketiga dinilai sebesar nilai kontrak kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga.

##### **1.5.3. Aset Tidak Berwujud**

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

##### **1.5.4. Aset Lain - lain**

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya.

## **2. Kewajiban**

### **2.1. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang

Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

**2.1.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

**2.1.2. Utang Bunga**

Utang Bunga timbul karena pemerintah mempunyai pinjaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk penerbitan sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN). Akun ini pada umumnya ada di unit kerja yang berfungsi sebagai pengelola keuangan/pinjaman. Oleh karena itu, inventarisasi atas utang bunga dilakukan bersamaan dengan inventarisasi utang. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah.

**2.1.3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Akun ini biasanya muncul pada unit yang berfungsi sebagai pengelola keuangan/pinjaman.

**2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan diterima dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

**2.1.5. Utang Beban**

Utang beban merupakan utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

**2.1.6. Utang Jangka Pendek Lainnya**

**2.2. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan dari penerbitan sekuritas pemerintah.

#### **2.2.1. Utang Dalam Negeri**

Utang dalam negeri merupakan utang jangka panjang yang berasal dari pinjaman pemerintah pada perbankan, dan diharapkan akan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca. Akun ini pada umumnya ada di unit yang berfungsi sebagai pengelola keuangan/pinjaman. Oleh karena itu, inventarisasi atas utang dalam negeri dari sektor perbankan dilakukan di satuan kerja pengelola keuangan.

#### **2.2.2. Utang Jangka Panjang Lainnya**

### **3. Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

## **E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Bab V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan - LRA

Jumlah Pendapatan –LRA pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar *Rp. 0,00* terealisasi sebesar *Rp atau %*, sedangkan realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar *Rp. 329.667.860,88*. Seluruh pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perbandingan Realisasi Pendapatan – LRA per 31 Desember 2021 dan 2020 sesuai Stándar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut :

Tabel 5.1. Realisasi Pendapatan – LRA Per 31 Desember 2021 dan 2020

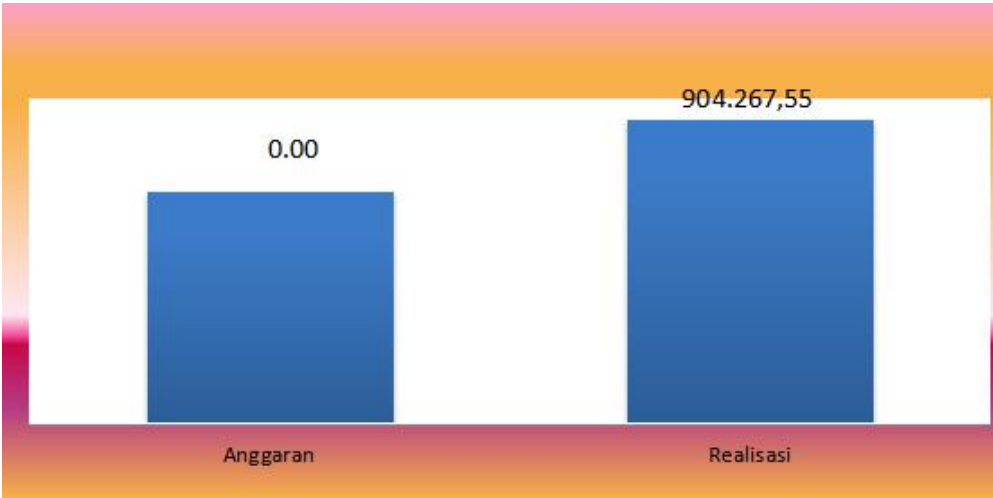
NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	0.00	904,267.55	0.00	4,582,991.48
Jumlah		0.00	904,267.55	0.00	4,582,991.48

Jumlah pendapatan tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA dengan target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar *Rp. 0,00* terealisasi sebesar *Rp. 904.267,55 atau 0,00%*, sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA tahun 2020 sebesar *Rp. 4.582.991,48*

Gambaran angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA adalah sebagai berikut :



Rincian atas Realisasi PAD – LRA tersebut sebagai berikut :

Tabel 5.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	0.00	904,267.55	0.00	4,582,991.48
Jumlah		0.00	904,267.55	0.00	4,582,991.48

1.1. Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Pendapatan Retribusi Daerah – LRA dengan target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar Rp. 0,00, terealisasi sebesar Rp atau %, mengalami kenaikan sebesar Rp. dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 0,00.

Tabel 5.3. Realisasi Retribusi Daerah – LRA Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00	0.00	0.00

1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LRA dengan target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar Rp.0,00 terealisasi sebesar Rp. 904.267,55 atau 0,00 %, mengalami penurunan sebesar Rp. 3.678.724,00 dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 4.582.991,55 .

Rincian atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4. Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah – LRA Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Jasa Giro Pemegang Kas - LRA	0.00	904,267.55	0.00	1,723,951.48
3	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	0.00	0.00	0.00	2,859,040.00
Jumlah		0.00	904,267.55	0.00	4,582,991.48

Lain – Lain PAD yang Sah – LRA terdiri dari

**1. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya – LRA**

Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya – LRA dengan target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar *Rp. 0,00*, terealisasi sebesar *Rp atau 0,00 %*, mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang terealisasi sebesar *Rp. 0,00*.

**2. Jasa Giro Pemegang Kas – LRA**

Jasa Giro Pemegang Kas – LRA dengan target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar *Rp. 0,00* terealisasi sebesar *Rp 904.267,55 atau 0,00 %*, mengalami penurunan dari tahun 2020 yang terealisasi sebesar *Rp. 4.582.991,48*.

Rincian penerimaan jasa giro pemegang kas tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5. Penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas Tahun 2021 dan 2020

NO	BULAN	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)
1	Januari	42,107.45	194,280.11
2	Pebruari	78,590.22	69,444.63
3	Maret	59,850.72	111,917.79
4	April	78,806.41	102,540.01
5	Mei	80,086.77	70,431.70
6	Juni	77,446.77	145,687.07
7	Juli	87,787.31	141,892.13
8	Agustus	84,140.57	180,037.37
9	September	82,724.25	208,845.64
10	Oktober	91,411.12	229,680.80
11	Nopember	81,575.33	140,604.59
12	Desember	59,740.63	128,589.64
Jumlah		904,267.55	1,723,951.48

Semua realisasi penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas Tahun 2021 di auto debet dengan dikeluarkannya Nota Debet oleh pihak Bank.

**3. Pendapatan dari Pengembalian - LRA**

Pendapatan dari Pengembalian – LRA dengan target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar *Rp. 0,00*, terealisasi sebesar *Rp atau 0,00 %*, mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang terealisasi sebesar *Rp. 2.859.040,00*.

Rincian pendapatan dari pengembalian – LRA tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6. Pendapatan dari Pengembalian - LRA Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA	0.00	0.00	0.00	2,859,040.00
2	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Lainnya - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00	0.00	2,859,040.00

3.1. Pendapatan dari Pengembalian Belanja – LRA

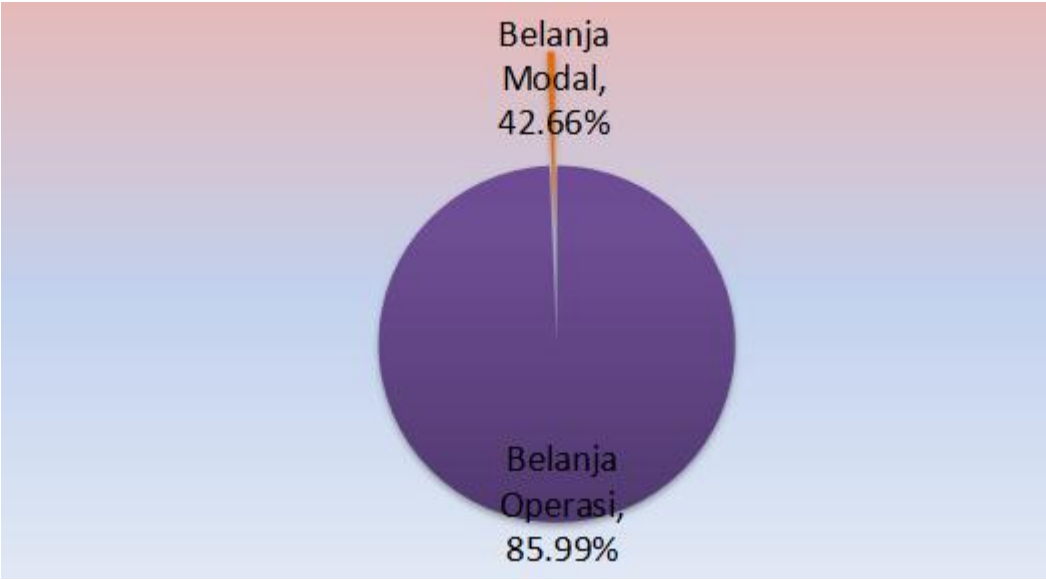
Pendapatan dari Pengembalian Belanja – LRA tahun 2021 sebesar Rp. 0,00 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 2.859.040,00.

5.1.2 Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Belanja daerah dengan target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar Rp. 12.132.427.631,00 terealisasi sebesar Rp. 10.432.403.368,00 atau 85,99%, mengalami penurunan sebesar Rp. 10.795.332.957,00 dibandingkan realisasi belanja Tahun 2020 sebesar Rp. 362.929.589,00. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

Komposisi Realisasi Belanja Daerah





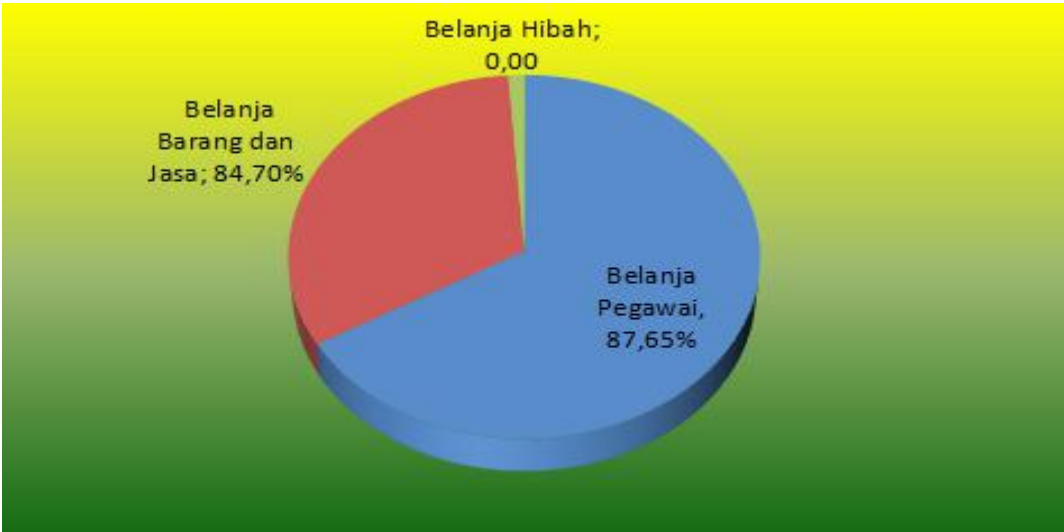
Tabel. 5.7. Realisasi Belanja Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Operasi	11,975,945,639.00	10,365,649,868.00	86.55	10,795,332,957.00
2	Belanja Modal	156,481,992.00	66,753,500.00	42.66	-
Jumlah		12,132,427,631.00	10,432,403,368.00	85.99	10,795,332,957.00

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dengan target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar Rp. 11.975.945.639,00 terealisasi sebesar Rp. 10.365.649.868,00 atau 86,55%, mengalami penurunan sebesar (Rp. 429.683.089,00) dibandingkan realisasi belanja operasi Tahun 2020 sebesar Rp. 10.795.332.957,00. Rincian atas jumlah belanja operasi sebagai berikut:

Komposisi Realisasi Belanja Operasi



Tabel. 5.8. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	7,520,464,225.00	6,591,652,688.00	87.65	10,561,246,176.00
2	Belanja Barang dan Jasa	4,455,481,414.00	3,773,997,180.00	84.70	6,435,844,017.00
3	Belanja Hibah	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
Jumlah		11,975,945,639.00	10,365,649,868.00	86.55	16,997,090,193.00

Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut:

1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar Rp. 7.520.464.255,00 terealisasi sebesar Rp. 6.591.652.688,00 atau 87,65 %, realisasi tersebut merupakan 86,55 % dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. Sedangkan realisasi belanja pegawai Tahun 2021 sebesar Rp. 6.591.652.688,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 3.969.593.488,00) dibandingkan Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 10.561.246.176,00 . Rincian dari belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.9. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	3,694,814,401.00	3,231,279,249.00	87.45	3,475,328,390.00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3,825,649,824.00	3,360,373,439.00	87.84	4,002,606,891.00
3	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Honorarium PNS	0.00	0.00	0.00	818,865,000.00
5	Honorarium Non PNS	0.00	0.00	0.00	531,864,000.00
Jumlah		7,520,464,225.00	6,591,652,688.00	87.65	8,828,664,281.00

1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar Rp. 4.455.481.414,00 terealisasi sebesar Rp. 3.773.997.180,00 atau 84,70%. Realisasi tersebut merupakan 86,55% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar (Rp. 2.126.421.779,00 ) dibandingkan Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 1.647.575.401,00. Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut:

Tabel. 5.10. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1,540,309,658.00	1,026,585,920.00	66.65	269,796,900.00
2	Belanja Bahan/Material	0.00	0.00	#DIV/0!	24,410,000.00
3	Belanja Jasa Kantor	1,554,630,700.00	1,529,994,104.00	98.42	451,767,953.00
4	Belanja Premi Asuransi	1,077,692,772.00	980,446,056.00	90.98	271,562,898.00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0.00	0.00	0.00	48,425,000.00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.00	0.00	0.00	77,141,750.00
7	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0.00	0.00	0.00	8,264,000.00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Belanja Makanan dan Minuman	0.00	0.00	0.00	87,550,000.00
11	Belanja Pakaian Kerja	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0.00	0.00	0.00	160,746,200.00
13	Belanja Perjalanan Dinas	39,330,000.00	34,960,000.00	88.89	222,376,700.00
14	Belanja Pemeliharaan	239,918,284.00	199,611,100.00	83.20	19,534,000.00
15	Belanja Jasa Konsultasi	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Belanja Honorarium Non Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Belanja Honorarium PNS	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Belanja Honorarium Non PNS	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Uang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3,600,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
20	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		4,455,481,414.00	3,773,997,180.00	84.70	1,647,575,401.00

1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah dengan target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Realisasi tersebut merupakan 0,00% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. Realisasi belanja hibah Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp. 0,00 ) dibandingkan Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 0,00. Rincian belanja hibah sebagai berikut

Tabel. 5.11. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	0.00	0.00	-	0.00
Jumlah		0.00	0.00	-	0.00

2. Belanja Modal

Belanja Modal dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 156.481.992,00 terealisasi sebesar Rp. 66.753.500,00 atau 42,66%, Realisasi belanja modal Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar (Rp. 66.753.500,00) dibandingkan Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 0,00. Rincian belanja modal sebagai berikut :

Tabel. 5.12. Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112,866,992.00	23,798,500.00	21.09	0.00
2	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	43,615,000.00	42,955,000.00	98.49	0.00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Belanja Aset tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	156,481,992.00	66,753,500.00	42.66	0.00

Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut:

2.1. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar Rp. 112.866.992,00 terealisasi sebesar Rp. 23.798.500,00 atau 21,09%. Realisasi tersebut merupakan 42,66% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp. 23.798.500,00) dibandingkan Tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 0,00. Rincian dari belanja peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.13. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Alat Kantor	19,074,660.00	2,898,500.00	15.20	0.00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15,501,500.00	0.00	0.00	0.00
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kera/Rapat Pejabat	25,226,461.00	20,900,000.00	82.85	0.00
	Belanja Modal Komputer Unit	47,564,371.00	0.00	0.00	0.00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	112,866,992.00	23,798,500.00	21.09	-

2.1

Tabel. 5.13. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	43,615,000.00	42,955,000.00	98.49	0.00
Jumlah		43,615,000.00	42,955,000.00	98.49	0.00

2.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. atau 0,00 %. Realisasi tersebut merupakan 0,00 % dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. dibandingkan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 0,00. Rincian belanja jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut :

Tabel. 5.15. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00	0.00	0.00

2.4. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar Rp. terealisasi sebesar Rp. atau %. Realisasi tersebut merupakan % dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Realisasi belanja aset tetap lainnya tahun 2021 mengalami penurunan sebesar (Rp. ) dibandingkan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 0,00. Rincian belanja aset tetap lainnya sebagai berikut :

Tabel. 5.16. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021		REALISASI 2020 (Rp)
			Rp	%	
1	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00	0.00	0.00



5.2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Saldo Pendapatan LO Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 904.267,55 yang mengalami penurunan sebesar (Rp. 819.683,93) atau (47,55%) dibandingkan pendapatan – LO tahun 2020 sebesar Rp. 1.723.951,48 Rincian Pendapatan – LO sebagai berikut :

Tabel. 5.17. Rincian Pendapatan – LO Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	SALDO 2021 (Rp)	SALDO 2020 ( Rp )	Naik (Turun)	
				Jumlah (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	904,267.55	1,723,951.48	(819,683.93)	(47.55)
2	Pendapatan Transfer - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		904,267.55	1,723,951.48	(819,683.93)	(47.55)

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan – LO dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 904.267,55 yang mengalami penurunan sebesar (Rp.819.683,93) atau ( 47,55%) dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD) – LO tahun 2020 sebesar Rp. 1.723.951,48 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO pada tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.18. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	SALDO 2021 (Rp)	SALDO 2020 ( Rp )	Naik (Turun)	
				Jumlah (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Lain-lain PAD yang Sah - LO	904,267.55	1,723,951.48	(819,683.93)	(47.55)
Jumlah		904,267.55	1,723,951.48	(819,683.93)	(47.55)

Saldo pendapatan retribusi daerah - LO pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 0,00 Pendapatan Retribusi Daerah – LO mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,00 atau 0,0% dibandingkan pendapatan retribusi daerah – LO tahun 2020 sebesar Rp. 0,00

1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Rp. 0,00

1.4. Lain-lain PAD yang Sah – LO

Saldo pendapatan pada lain-lain PAD yang sah - LO pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 904.267,55 mengalami penurunan sebesar (Rp. 819.683,93) atau ( 47,55%) dibandingkan Lain-lain PAD yang Sah - LO tahun 2020 sebesar Rp. 1.723.951,48 Rincian pendapatan pada lain-lain PAD yang sah – LO adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.19. Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LO Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	SALDO 2021 (Rp)	SALDO 2020 ( Rp )	Naik (Turun)	
				Jumlah (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO	0.00	0.00	-	0.00
2	Jasa Giro Pemegang Kas - LO	904,267.55	1,723,951.48	(819,683.93)	(47.55)
3	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Lainnya - LO	0.00	2,859,040.00	(2,859,040.00)	(100.00)
4	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	0.00	0.00	-	-
Jumlah		904,267.55	4,582,991.48	(3,678,723.93)	(80.27)

Uraian dari lain-lain PAD yang sah – LO adalah sebagai berikut :

1. Saldo Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya – LO pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo tahun 2020 sebesar Rp . 0,00
2. Saldo Jasa Giro Pemegang Kas – LO pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 904.267,55 mengalami penurunan sebesar (Rp. 819.683,93) atau (47,55 %) dibandingkan saldo tahun 2020 sebesar Rp . 1.723.951,48
3. Saldo Pendapatan dari Pengembalian Belanja – LO tahun 2021 sebesar Rp.0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. (Rp. 2.859.040,00) dibandingkan saldo tahun 2020 sebesar Rp. 2.859.040,00
4. Saldo Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO tahun 2021 sebesar Rp. mengalami penurunan sebesar (Rp. ) atau ( %) dibandingkan saldo tahun 2020 sebesar Rp. .

2. Pendapatan Transfer - LO

2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Rp. 0,00

2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Rp. 0,00

2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO Rp. 0,00

2.4. Bantuan Keuangan - LO Rp. 0,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

3.1. Pendapatan Hibah - LO Rp. 0,00

3.2. Dana Darurat - LO	Rp.	0,00
3.3. Pendapatan Lainnya - LO	Rp.	0,00

5.2.2. Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Saldo beban pada Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2021 sebesar *Rp. 10.645.048.238,00* mengalami penurunan sebesar (*Rp. 365.710.264,00* ) atau ( *3,32%*) dibandingkan jumlah beban Tahun 2020 sebesar *Rp 11.010.758.502,00*.

Rincian atas beban tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.20. Rincian Beban Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	SALDO 2021 (Rp)	SALDO 2020 ( Rp )	Naik (Turun)	
				Jumlah (Rp)	%
1	Beban Pegawai - LO	6,591,652,688.00	8,752,676,278.00	(2,161,023,590.00)	(24.69)
2	Beban Barang	1,030,441,570.00	617,277,050.00	413,164,520.00	66.93
3	Beban Jasa	2,510,440,160.00	737,589,500.00	1,772,850,660.00	240.36
4	Beban Pemeliharaan	199,611,100.00	67,959,000.00	131,652,100.00	193.72
5	Beban Perjalanan Dinas	34,960,000.00	222,376,700.00	(187,416,700.00)	(84.28)
6	Beban Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
7	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Beban Hibah	0.00	319,093,275.00	(319,093,275.00)	(100.00)
10	Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Beban Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Beban Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	275,542,720.00	0.00	275,542,720.00	0.00
14	Beban Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Beban Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Beban Bantuan Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		10,645,048,238.00	10,716,971,803.00	(71,923,565.00)	(0.67)

Adapun uraian dari rincian beban sebagai berikut :

1. Beban Pegawai – LO

Saldo beban pegawai pada Tahun 2021 sebesar *Rp. 6.591.652.688,00* mengalami penurunan sebesar (*Rp. 2.237.011.593,00*) atau (*24,69%*) dibandingkan beban pegawai Tahun 2020 sebesar *Rp. 8.828.664.281,00*. Rincian beban pegawai – LO sebagai berikut :



Tabel. 5.21. Rincian Beban Pegawai – LO Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	SALDO 2021 (Rp)	SALDO 2020 ( Rp )	Naik (Turun)	
				Jumlah (Rp)	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	3.231.279.249,00	3.475.328.390,00	(244.049.141,00)	(7,02)
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	3.360.373.439,00	4.002.606.891,00	(642.233.452,00)	(16,05)
3.	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	-
4.	Beban Honorarium PNS	0,00	818.865.000,00	-818.865.000,00	0,00
5.	Beban Honorarium Non PNS	0,00	531.864.000,00	-531.864.000,00	0,00
Jumlah		6.591.652.688,00	8.828.664.281,00	(2.237.011.593,00)	(25,34)

2. Beban Persediaan

Saldo beban persediaan pada Tahun 2021 sebesar *Rp. 1.026.585.920,00* mengalami kenaikan sebesar (*Rp. 406.941.070,00* ) atau (*60,36%*) dibandingkan jumlah beban persediaan Tahun 2020 sebesar *Rp. 619.644.850,00* . Rincian beban persediaan adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.22. Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	SALDO 2021 (Rp)	SALDO 2020 ( Rp )	Naik (Turun)	
				Jumlah (Rp)	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	1.026.585.920,00	269.796.900,00	756.789.020,00	26,28
2	Beban Persediaan Bahan/Material	0,00	24.410.000,00	(24.410.000,00)	-
3	Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	77.141.750,00	(77.141.750,00)	-
4	Beban Makanan dan Minuman	0,00	87.550.000,00	(87.550.000,00)	-
5	Beban Pakaian Kerja	0,00	0,00	-	-
6	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	160.746.200,00	(160.746.200,00)	-
Jumlah		1.026.585.920,00	619.644.850,00	406.941.070,00	60,36

3. Beban Jasa

Saldo beban jasa pada Tahun 2021 terealisasi sebesar *Rp. 2.510.440.160,00* mengalami kenaikan sebesar (*Rp. 1.772.845.309,00* ) atau ( *29,38%*) dibandingkan saldo beban jasa Tahun 2020 sebesar *Rp. 737.594.851,00*. Rincian beban jasa adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.23. Rincian Beban Jasa Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	SALDO 2021 (Rp)	SALDO 2020 ( Rp )	Naik (Turun)	
				Jumlah (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	1.529.797.908,00	451.767.953,00	1.078.029.955,00	29,53
2	Beban Premi Asuransi	980.642.252,00	271.562.898,00	709.079.354,00	27,69
3	Beban Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	0,00
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	8.264.000,00	(8.264.000,00)	0,00
5	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	-	0,00
6	Beban Jasa Konsultasi	0,00	0,00	-	0,00
7	Beban Honorarium Non Pwgawai	0,00	0,00	-	0,00
8	Beban Honorarium PNS - LO	0,00	0,00	-	0,00
9	Beban Honorarium Non PNS - LO	0,00	0,00	-	0,00
10	Beban Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00	-	0,00
11	Beban penghargaan atas lomba dan prestasi	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah		2.510.440.160,00	737.594.851,00	1.772.845.309,00	29,38

4. Beban Pemeliharaan

Saldo beban pemeliharaan pada Tahun 2021 sebesar *Rp. 199.611.100,00* mengalami kenaikan sebesar (*Rp. 131.652.100,00* ) atau (*34,05%*) dibandingkan saldo Tahun 2020 sebesar *Rp. 67.959.000,00*. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.24. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	SALDO 2021 (Rp)	SALDO 2020 ( Rp )	Naik (Turun)	
				Jumlah (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	198.211.100,00	18.509.000,00	179.702.100,00	9,34
2	Beban PemeliharaanGedung dan Bangunan	1.400.000,00	1.025.000,00	375.000,00	73,21
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	48.425.000,00	(48.425.000,00)	-
Jumlah		199.611.100,00	67.959.000,00	131.652.100,00	34,05

5. Beban Perjalanan Dinas

Saldo beban perjalanan dinas pada Tahun 2021 sebesar *Rp. 34.960.000,00* mengalami penurunan sebesar (*Rp. 187.416.700,00* ) atau (*84,28 %*) dibandingkan saldo Tahun 2020 sebesar *Rp. 222.376.700,00*. Rincian beban perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.25. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	SALDO 2021 (Rp)	SALDO 2020 ( Rp )	Naik (Turun)	
				Jumlah (Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.960.000,00	72.900.000,00	(37.940.000,00)	(52,04)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	149.476.700,00	(149.476.700,00)	-
Jumlah		34.960.000,00	222.376.700,00	(187.416.700,00)	(84,28)

Catatan

7.      **Beban Subsidi**

8.      **Beban Hibah**

Saldo beban hibah pada tahun 2021 terealisasi Rp. 0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 319.093.275,00 ) atau ( 0 %) dibandingkan saldo Tahun 2020 sebesar Rp. 319.093.275,00. Rincian beban hibah adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.26. Rincian Beban Hibah Tahun 2021 dan 2020

NO	U R A I A N	SALDO 2021 (Rp)	SALDO 2020 ( Rp )	Naik (Turun)	
				Jumlah (Rp)	%
1	Beban hibah barang / jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat	0,00	319.093.275,00	(319.093.275,00)	-
Jumlah		0,00	319.093.275,00	(319.093.275,00)	-

9. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Saldo beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2021 sebesar (Rp. 0) yang mengalami penurunan sebesar (Rp. 0 ) atau ( 0%) dibandingkan saldo Tahun 2020 sebesar (Rp. 0,00).

10. <b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
11. <b>Beban Lain-lain</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
12. <b>Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah</b>	<b>Rp.</b>	

5.2.3. **Kegiatan Non Operasional**

Kegiatan Non Operasional adalah kegiatan yang terlaksana di luar kegiatan pokok yang terdiri dari :

1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	Rp.	0,00
2. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	Rp.	0,00
3. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	Rp.	0,00
4. Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO	Rp.	0,00
5. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	Rp.	0,00
6. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	Rp.	0,00

5.2.4. **Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan. Pos luar biasa terdiri dari :

1. Beban Tak Terduga	Rp.	0,00
----------------------	-----	------

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1. Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan Ekuitas secara rinci sebagai berikut :

Tabel. 5.28. Rincian Perubahan Ekuitas Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020
EKUITAS AWAL	898.781.706,00	1.081.069.610,00
SURPLUS/DEFISIT - LO	-10.644.143.970,45	-11.009.034.550,52
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR : Koreksi Ekuitas	3.601.681,00	35.996.681,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	10.431.499.100,45	10.790.749.965,52
EKUITAS AKHIR	689.738.517,00	898.781.706,00

Uraian secara rinci dari Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas awal per 1 Januari 2021 adalah sebesar *Rp. 898.781.706,00* mengalami kenaikan sebesar *Rp. 182.287.904,00* dibandingkan tahun 2020 sebesar *Rp. 1.081.069.610,00*

2. Surplus/Defisit - LO

Nilai (Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (*Rp. 10.644.143.970,45*) mengalami kenaikan sebesar *Rp. 364.890.580,07* dibandingkan tahun 2020 sebesar (*Rp. 11.009.034.550,52* ). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada tahun 2021 sebesar *Rp. 3.601.681,00* mengalami penurunan sebesar (*Rp. 32.395.001,00* ) dibandingkan tahun 2020 sebesar *Rp. 35.996.681,00*

4. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Saldo kewajiban untuk dikonsolidasikan pada tahun 2021 adalah sebesar *Rp. 10.431.499.100,45* mengalami penurunan sebesar (*Rp. 359.250.865,07* ) dibandingkan saldo tahun 2020 sebesar *Rp. 10.790.749.965,52*.



5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 689.738.517,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 209.043.189,00 dibandingkan saldo tahun 2020 sebesar Rp. 898.781.706,00

5.4. NERACA

Neraca merupakan laporan keuangan yang mencakup asset, kewajiban dan modal / ekuitas.

5.4.1 Aset

Saldo Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021 dan 2020 akan diuraikan dalam komponen aset yang terdiri dari :

Tabel. 5.30. Komponen Aset Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	2.473.950,00	6.329.600,00
JUMLAH ASET LANCAR	2.473.950,00	6.329.600,00
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.439.626.721,98	3.405.268.221,98
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	-2.789.100.787,98	-2.513.558.067,98
JUMLAH ASET TETAP	650.525.934,00	891.710.154,00
<b>ASET LAINNYA</b>		
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	1.073.332,00	1.073.332,00
JUMLAH ASET LAINNYA	1.073.332,00	1.073.332,00
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>654.073.216,00</b>	<b>899.113.086,00</b>

	<u>2021</u>	<u>2021</u>
<b>5.4.1.1. Aset Lancar</b>	<b>Rp. 2.473.950,00</b>	<b>Rp. 6.329.600,00</b>
1. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00	Rp. 0,00
3. Kas di BLUD	RP. 0,00	Rp. 0,00
4. Kas Dana Bos	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp. 0,00	Rp. 0,00
6. Kas Lainnya	Rp. 0,00	Rp. 0,00
7. Setara Kas	Rp. 0,00	Rp. 0,00
8. Investasi Jangka Pendek	Rp. 0,00	Rp. 0,00
9. Piutang Pajak Daerah	Rp. 0,00	Rp. 0,00
10. Piutang Retribusi Daerah	Rp. 0,00	Rp. 0,00
11. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	Rp. 0,00	Rp. 0,00
12. Piutang Lain-lain PAD yang sah	Rp. 0,00	Rp. 0,00
13. Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 0,00	Rp. 0,00
14. Piutang Transfer Antar Daerah	Rp. 0,00	Rp. 0,00
15. Piutang Lainnya	Rp. 0,00	Rp. 0,00
16. Penyisihan Piutang	Rp. 0,00	Rp. 0,00
17. Beban dibayar dimuka	Rp. 0,00	Rp. 0,00
18. Persediaan	<b>Rp. 2.473.950,00</b>	<b>Rp6.329.600,00</b>

Jumlah saldo persediaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2.473.950,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 3.855.650,00) dibandingkan saldo persediaan Tahun 2020 sebesar Rp. 6.329.600,00. Rincian dari saldo persediaan adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.31. Rincian Persediaan Tahun 2021 dan 2020

NO.	JENIS PERSEDIAAN	JUMLAH (Rp)	
		2021	2020
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	719.500,00	1.529.100,00
2	Persediaan Bahan Cetak	1.096.450,00	1.107.500,00
3	Persediaan Benda Pos	640.000,00	0,00
4	Persediaan Perangko, materai dan benda po	18.000,00	453.000,00
5	Persediaan BBM da gas lainnya	0,00	3.240.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.473.950,00</b>	<b>6.329.600,00</b>

<b>5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang</b>			
<b>1.</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.</b>	<b>Investasi dalam Obligasi</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Investasi dalam Proyek Pembangunan</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.</b>	<b>Dana Bergulir</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.</b>	<b>Deposito Jangka Panjang</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.</b>	<b>Investasi Non Permanen Lainnya</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.</b>	<b>Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.</b>	<b>Investasi Permanen Lainnya</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

**5.4.1.3. Aset Tetap . Rp 650.525.934,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai aktiva tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung. Daftar penambahan dan pengurangan aset pada Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut :

**1. Tanah**

Jumlah Aset Tanah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 0,00 tidak ada perubahan nilai dibandingkan jumlah asset tanah tahun 2020 sebesar Rp0,00. Rincian penambahan dan pengurangan asset tanah sebagai berikut :

Tabel .5.32. Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tanah Tahun 2021 dan 2020

1	Tanah	TAHUN 2021		TAHUN 2020	
	Saldo Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020	Rp	0,00	Rp	0,00
	Mutasi Aset Tetap Tanah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Badung periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, terinci sebagai berikut :				
	Saldo Awal				
	- Tanah	Rp		Rp	
	Penambahan				
	- Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Non Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Penyesuaian Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Mutasi Antar OPD	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Hibah	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Lain-lain (Kurang Catat)	Rp	0,00	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	0,00	Rp	0,00
	Pengurangan				
	- Penghapusan	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Usulan Penghapusan	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Penyesuaian Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Belanja Modal Bukan Aset	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Mutasi ke OPD Lain	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Hibah	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Lain-lain	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Koreksi (Penyesuaian)	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Barang Ekstracompatable	Rp	0,00	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	0,00	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	0,00	Rp	0,00
	Jumlah KIB A (Tanah) sebesar	Rp		Rp	
	Selisih sebesar	Rp	0,00	Rp	0,00
	Terdiri dari Kapitalisasi sebesar	Rp	0,00	Rp	
	Usulan Penghapusan	Rp	0,00	Rp	0,00
	Pemberian Hibah ke Pihak Ketiga	Rp	0,00	Rp	
	Jumlah	Rp	0,00	Rp	0,00



2. Peralatan dan Mesin

Jumlah Aset Peralatan dan Mesin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.439.626.721,98 mengalami kenaikan sebesar Rp. 34.358.500,00 dibandingkan jumlah asset peralatan dan mesin tahun 2020 sebesar Rp. 3.405.268.221,98,00. Rincian penambahan dan pengurangan aset peralatan dan mesin sebagai berikut :

Tabel .5.33. Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020

2	Peralatan dan Mesin	TAHUN 2021		TAHUN 2020	
	Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020	Rp	3.439.626.721,98	Rp	3.405.268.221,98
	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Badung periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, terinci sebagai berikut :				
	Saldo Awal				
	- Peralatan dan Mesin	Rp	3.405.268.221,98	Rp	3.405.268.221,98
	Penambahan				
	- Belanja Modal (LRA)	Rp	66.753.500,00	Rp	0,00
	- Belanja Modal (Hutang)	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Non Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Penyesuaian Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Mutasi Antar OPD	Rp	32.395.000,00	Rp	0,00
	- Penerimaan Hibah	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Lain-lain (Kurang Catat)	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Koreksi (Penyesuaian)	Rp	0,00	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	3.439.626.721,98	Rp	0,00
	Pengurangan				
	- Penghapusan	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Usulan Penghapusan	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Penyesuaian Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Belanja Modal Bukan Aset	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Mutasi ke OPD Lain	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Hibah	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Lain-lain	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Koreksi (Penyesuaian)	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Barang Reklasifikasi	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Barang Ekstracompatable	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Pemindahan Rekening	Rp	0,00	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	0,00	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	3.439.626.721,98	Rp	3.405.268.221,98
	Jumlah KIB B (Peralatan dan Mesin) sebesar	Rp	0,00	Rp	0,00
	Selisih sebesar	Rp	0,00	Rp	0,00
	Terdiri dari Kapitalisasi sebesar	Rp	0,00	Rp	0,00
	Usulan Penghapusan	Rp	0,00	Rp	0,00
	Pemberian Hibah ke Pihak Ketiga	Rp	0,00	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	0,00	Rp	0,00

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar **Rp. 66,753,500,00** terdiri dari :

1.	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari belanja modal (LRA) sebesar <b>Rp. 66,753,500,00</b> terdiri dari :		
-	Pengadaan Modal Peralatan dan mesin	:Rp	23.798.500,00
-	Pengadaan Modal Gedung dan Bangunan	:Rp	42.955.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>:Rp</b>	<b>66.753.500,00</b>

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar **Rp. 42,955,000,00** terdiri dari :

1.	Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa lantai vinil yangdi serahkan ke bagian Asset Setda Kab. Badung	:Rp	32.395.000,00
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------

02.00 Sisa dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp. 10,560,000,- masuk ke Peralatan dan Mesin Kib B

3. Gedung dan Bangunan

Jumlah Aset Gedung dan Bangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021 adalah sebesar *Rp. 0,00* mengalami kenaikan sebesar *Rp. 0,00* dibandingkan jumlah asset Gedung dan Bangunan tahun 2020 sebesar *Rp. 0,00*.

Rincian penambahan dan pengurangan aset gedung dan bangunan sebagai berikut :

Tabel. 5.34. Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan 2020

3	Gedung dan Bangunan	TAHUN 2021		TAHUN 2020	
	Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020	Rp	0,00	Rp	0,00
	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Badung periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020, terinci sebagai berikut :				
	Saldo Awal				
	- Gedung dan Bangunan	Rp		Rp	
	Penambahan				
	- Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Non Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Penyesuaian Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Mutasi Antar OPD	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Penerimaan Hibah	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Lain-lain	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Koreksi (Penyesuaian)	Rp	0,00	Rp	
	- Pemindahan Rekening	Rp	0,00	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	0,00	Rp	0,00
	Pengurangan				
	- Penghapusan	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Usulan Penghapusan	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Penyesuaian Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Belanja Modal Bukan Aset	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Mutasi ke OPD Lain	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Hibah	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Lain-lain	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Koreksi (Penyesuaian)	Rp	0,00	Rp	0,00
	- Barang Ekstracompatible	Rp	0,00	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	0,00	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	0,00	Rp	0,00
	Jumlah KIB C (Gedung dan Bangunan) sebesar	Rp	0,00	Rp	
	Selisih sebesar	Rp	0,00	Rp	0,00
	Terdiri dari Kapitalisasi sebesar	Rp	0,00	Rp	0,00
	Usulan Penghapusan	Rp	0,00	Rp	0,00
	Pemberian Hibah ke Pihak Ketiga	Rp	0,00	Rp	0,00
	Jumlah	Rp	0,00	Rp	0,00

Jumlah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 0,00) dibandingkan jumlah aset jalan, irigasi dan jaringan tahun 2020 sebesar Rp. 0,00. Rincian penambahan dan pengurangan aset jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut :

Tabel. 5.35. Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 dan 2020

4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
	Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020	Rp 0.00	Rp 0.00
	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Badung periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, terinci sebagai berikut :		
	Saldo Awal		
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	Rp
	Penambahan		
	- Belanja Modal	Rp 0.00	Rp 0.00
	- Penyesuaian Belanja Modal	Rp 0.00	Rp 0.00
	- Non Belanja Modal	Rp 0.00	Rp 0.00
	- Mutasi Antar OPD	Rp 0.00	Rp 0.00
	- Hibah	Rp 0.00	Rp 0.00
	- Lain-lain	Rp 0.00	Rp 0.00
	Jumlah	Rp 0.00	Rp 0.00
	Pengurangan		
	- Penghapusan	Rp 0.00	Rp 0.00
	- Usulan Penghapusan	Rp 0.00	Rp 0.00
	- Penyesuaian Belanja Modal	Rp 0.00	Rp 0.00
	- Belanja Modal Bukan Aset	Rp 0.00	Rp 0.00
	- Mutasi ke OPD Lain	Rp 0.00	Rp 0.00
	- Hibah	Rp 0.00	Rp 0.00
	- Lain-lain	Rp 0.00	Rp 0.00
	- Koreksi (Penyesuaian)	Rp 0.00	Rp
	- Barang Ekstracompatable	Rp 0.00	Rp 0.00
	Jumlah	Rp 0.00	Rp 0.00
	Jumlah	Rp 0.00	Rp 0.00
	Jumlah KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)	Rp 0.00	Rp 0.00
	Selisih sebesar	Rp 0.00	Rp 0.00
	Terdiri dari Kapitalisasi sebesar	Rp 0.00	Rp 0.00
	Usulan Penghapusan	Rp 0.00	Rp 0.00
	Pemberian Hibah ke Pihak Ketiga	Rp 0.00	Rp 0.00
	Jumlah	Rp 0.00	Rp 0.00

4. Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,00 dibandingkan jumlah aset tetap lainnya tahun 2020 sebesar Rp. 0,00. Rincian penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya sebagai berikut :

Tabel. 5.36. Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya  
Tahun 2021 dan 2020

5	Aset Tetap Lainnya	TAHUN 2021	TAHUN 2020
	Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020	Rp 0,00	Rp 0,00
	Mutasi Aset Tetap Lainnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Badung periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, terinci sebagai berikut :		
	Saldo Awal		
	- Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00
	Penambahan		0,00
	- Belanja Modal	Rp 0,00	Rp 0,00
	- Non Belanja Modal	Rp 0,00	Rp 0,00
	- Penyesuaian Belanja Modal	Rp 0,00	Rp 0,00
	- Mutasi Antar OPD	Rp 0,00	Rp 0,00
	- Hibah	Rp 0,00	Rp 0,00
	- Lain-lain (Kurang Catat)	Rp 0,00	Rp 0,00
	- Koreksi (Penyesuaian)	Rp 0,00	Rp 0,00
	Jumlah	Rp 0,00	Rp 0,00
	Pengurangan		
	- Penghapusan	Rp 0,00	Rp 0,00
	- Usulan Penghapusan	Rp 0,00	Rp 0,00
	- Penyesuaian belanja modal	Rp 0,00	Rp 0,00
	- Belanja Modal Bukan Aset	Rp 0,00	Rp 0,00
	- Mutasi ke OPD Lain	Rp 0,00	Rp 0,00
	- Hibah	Rp 0,00	Rp 0,00
	- Lain-lain	Rp 0,00	Rp 0,00
	- Koreksi (Penyesuaian)	Rp 0,00	Rp 0,00
	- Barang Reklasifikasi	Rp 0,00	Rp 0,00
	- Barang Ekstracompatable	Rp 0,00	Rp 0,00
	Jumlah	Rp 0,00	Rp 0,00
	Jumlah	Rp 0,00	Rp 0,00
	Jumlah KIB E (Aset Tetap Lainnya) sebesar	Rp 0,00	Rp 0,00
	Selisih sebesar	Rp 0,00	Rp 0,00
	Terdiri dari Kapitalisasi sebesar	Rp 0,00	Rp 0,00
	Usulan Penghapusan	Rp 0,00	Rp 0,00
	Pemberian Hibah ke Pihak Ketiga	Rp 0,00	Rp 0,00
	Jumlah	Rp 0,00	Rp 0,00

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0,00

7. Akumulasi Penyusutan Rp. (2.789.100.787,98,00)

Jumlah akumulasi penyusutan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. . (2.789.100.787,98,00) Jumlah akumulasi penyusutan pada Tahun 2020 sebesar (Rp. (2.513.558.067,98,00). per 1 Januari 2021 mengalami penambahan penyusutan sebesar (Rp. 275.542.720,00) karena pertama ; adanya penambahan akumulasi penyusutan per 1 januari 2021 pada peralatan dan mesin sebesar (Rp. 140.401.201,00) dan Gedung dan bangunan sebesar (Rp.135.141.519,00) sebagai berikut :

Rincian akumulasi penyusutan sebagai berikut :

Tabel. 5.37. Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2021

NO.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Januari 2021	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2021
				SEMESTER I	SEMESTER II	
	ASET TETAP					
1.	TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PERALATAN DAN MESIN	0,00	2.513.558.068,00	140.401.201,00	135.141.519,00	2.789.100.788,00
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	2.513.558.068,00	0,00	0,00	2.789.100.788,00
	JUMLAH			0,00		
	ASET LAINNYA					
1	PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH			0,00		
	JUMLAH TOTAL			0,00		

5.4.1.4. Dana Cadangan Rp. 0,00

5.4.1.5. Aset Lainnya Rp. 0,00

Aset lainnya pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 0,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 0 ) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 0,00.

1.	Tagihan Jangka Panjang	Rp	0,00
2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	0,00
3.	Aset Tidak Berwujud	Rp	0,00



4. Aset lain-lain Rp 1.073.332,00

Jumlah Aset lain-lain pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.073.332,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 0 ) dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 1.073.332,00 Rincian penambahan dan pengurangan aset lainnya sebagai berikut :

Tabel. 5.38. Rincian Penambahan dan Pengurangan Asset Lainnya Tahun 2021 dan 2020

Aset Lainnya	TAHUN 2021		TAHUN 2020	
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020	Rp	1,073,332.00	Rp	1,073,332.00
Mutasi Aset Lainnya Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021, terinci sebagai berikut :				
Saldo Awal				
- Aset Lainnya	Rp	1,073,332.00	Rp	1,073,332.00
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp	0.00	Rp	0.00
- Non Belanja Modal	Rp	0.00	Rp	0.00
- Penyesuaian Belanja Modal	Rp	0.00	Rp	0.00
- Mutasi Antar OPD	Rp	0.00	Rp	0.00
- Hibah	Rp	0.00	Rp	0.00
- Lain-lain (Kurang Catat)	Rp	0.00	Rp	0.00
- Pencatatan Hibah	Rp	0.00	Rp	0.00
- Reklasifikasi	Rp	0.00	Rp	0.00
Jumlah	Rp	0.00	Rp	0.00
Pengurangan				
- Penghapusan	Rp	0.00	Rp	0.00
- Usulan Penghapusan	Rp	0.00	Rp	0.00
- Penyesuaian Belanja Modal	Rp	0.00	Rp	0.00
- Belanja Modal Bukan Aset	Rp	0.00	Rp	0.00
- Mutasi ke OPD Lain	Rp	0.00	Rp	0.00
- Hibah	Rp	0.00	Rp	0.00
- Lain-lain	Rp	0.00	Rp	0.00
- Koreksi (Penyesuaian)	Rp	0.00	Rp	0.00
- Barang Ekstracompatible	Rp	0.00	Rp	0.00
- Penyusutan	Rp	0.00	Rp	-
Jumlah	Rp	0.00	Rp	0.00
Jumlah	Rp	0.00	Rp	

4.4.2. Kewajiban

Saldo Kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021 dan 2020 akan diuraikan dalam komponen kewajiban yang terdiri dari :

Tabel. 5.39. Komponen Kewajiban Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020
<b>KEWAJIBAN</b>		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Beban	331.380,00	331.380,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	331.380,00	331.380,00
JUMLAH KEWAJIBAN	331.380,00	331.380,00

<b>5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>Rp.</b>	<b>331.380,00</b>
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp.	0,00
2. Utang Bunga	Rp.	0,00
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp.	0,00
4. Pendapatan Diterima Dimuka	Rp.	0,00
5. Utang Beban		

Jumlah utang beban pada Tahun 2021 adalah sebesar *Rp. 331.380,00* mengalami penurunan sebesar (*Rp.0,00*) dibandingkantanahun 2020 sebesar *Rp. 331.380,00*.

Rincian utang beban pada tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel. 5.40. Rincian Utang Beban Tahun 2021 dan 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2021 ( Rp )	TAHUN 2020 ( Rp )
1	Utang Beban Telepon	331.380,00	331.380,00
2	Utang Beban Air	0,00	0,00
3	Utang Beban Listrik	0,00	0,00
4	Utang Beban Internet	0,00	0,00
5	Utang Beban TPP Dinamis	0,00	0,00
6	Utang Beban TPP Obyektif	0,00	0,00
Jumlah		331.380,00	331.380,00

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2021 dan 2020 sebesar *Rp. 0,00*

5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

1. Utang Dalam Negeri	Rp.	0,00
2. Utang Jangka Panjang Lainnya	Rp.	0,00

5.4.3. Ekuitas

Saldo ekuitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021 dan 2020 akan diuraikan dalam komponen ekuitas yang terdiri dari :

Tabel. 5.41. Komponen Ekuitas Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020
EKUITAS AWAL	898,781,706.00	1,081,069,610.00
SURPLUS/DEFISIT - LO	(10,644,143,970.45)	(11,009,034,550.52)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR : Koreksi Ekuitas	(32,395,000.00)	35,996,681.00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	10,431,499,100.45	10,790,749,965.52
EKUITAS AKHIR	653,741,836.00	898,781,706.00

5.4.3.1. Ekuitas Rp. 653.741.836,00

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung per tanggal 31 Desember 2021 yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Nilai ekuitas tahun 2021 sebesar *Rp. 653.741.836,00* mengalami kenaikan sebesar *Rp. (245.039.870,00)* dibandingkan ekuitas tahun 2020 sebesar *Rp. 898.781.706,00*



**Bab VI**  
**Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung merupakan lembaga teknis daerah.

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung berdasarkan Golongan, Eselon dan Tenaga Harian Lepas sebagai berikut :

Gol / Eselon / Pendidikan			Pegawai Struktural	Pegawai Fungsional	Tenaga Harian Lepas	Eselonering Pegawai
Golongan	Eselon	Pendidikan				
IV			10			
III			26			
II			11			
I			0			
JUMLAH			47		1	
		Sarjana	35			
		SMA	12			
		SMP				
		SD				
	II					
	IIIa					
	IIIb					
	IVa					
	IVb					
Jumlah				0	1	0
Jumlah Total			48			

## **BAB VII**

### **SIMPULAN PENTING TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung mendapat alokasi anggaran setelah perubahan 2021 sebesar *Rp. 12.132.427.631,00* terealisasi per 31 Desember 2021 sebesar *Rp. 10.432.403.368,00* atau mencapai *85,99%*.

Program dan kegiatan dari masing – masing bidang dapat terlaksana karena adanya koordinasi dan kerja sama yang baik, maka laporan keuangan dapat diselesaikan sebagai bahan informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang diharapkan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), serta diupayakan membuat pertanggungjawaban lebih tepat waktu.